



Strategi Komprehensif Pencegahan Ancaman Keamanan Laut di Perairan Perbatasan Tarakan

Dody Ahmad Farid Ibrahim^{*1}, Abdul Kadir Mulku², Amri Rahmatullah³

^{1,2,3,4}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: dodyahmad4466@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-01 Keywords: <i>Maritime Security; Tarakan Waters; Prevention Strategy; Hybrid Threats; Security Governance; Regional Cooperation.</i>	The waters of Tarakan, serving as an economic gateway and a defense frontline in North Kalimantan, face a complex spectrum of maritime security threats, ranging from piracy to natural resource crimes. This research aims to analyze the existing threat prevention strategy architecture and identify its implementation challenges to formulate a more comprehensive model. Using a qualitative research method through literature study and document analysis, this study examines the roles of state actors, regional mechanisms, and community participation. The main findings indicate that the existing security architecture is hybrid, integrating the forces of Kodaeral XIII and Bakamla, regional cooperation through the Trilateral Cooperative Arrangement (TCA), and community involvement via the Nusantara Sea Guard Volunteers (Repala). However, its effectiveness is hindered by systemic problems such as overlapping authority, gaps in asset and technology capacity, and the neglect of socio-economic root causes in coastal communities. In conclusion, an effective strategy requires institutionalized synergy through an integrated command center, the integration of technology with community-based intelligence, and a welfare-based preventive approach to address the root problems.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-01 Kata kunci: <i>Keamanan Maritim; Perairan Tarakan; Strategi Pencegahan; Ancaman Hibrida; Tata Kelola Keamanan; Kerjasama Regional.</i>	Perairan Tarakan, sebagai gerbang ekonomi dan garda depan pertahanan di Kalimantan Utara, menghadapi spektrum ancaman keamanan maritim yang kompleks, mulai dari perompakan hingga kejahatan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan ancaman yang ada dan mengidentifikasi problematika implementasinya untuk merumuskan model yang lebih komprehensif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen, penelitian ini membedah peran aktor negara, mekanisme regional, dan partisipasi komunitas. Hasil utama menunjukkan bahwa strategi keamanan yang ada bersifat hibrida, mengintegrasikan kekuatan Kodaeral XIII dan Bakamla, kerja sama regional melalui <i>Trilateral Cooperative Arrangement</i> (TCA), serta pelibatan masyarakat lewat Relawan Penjaga Laut Nusantara (Repala). Namun, efektivitasnya terhambat oleh problematika sistemik seperti tumpang tindih kewenangan, kesenjangan kapasitas aset dan teknologi, serta pengabaian akar masalah sosio-ekonomi di komunitas pesisir. Kesimpulannya, strategi yang efektif menuntut sinergi yang terinstitusionalisasi melalui pusat komando terpadu, integrasi teknologi dengan intelijen berbasis komunitas, dan pendekatan preventif berbasis kesejahteraan untuk mengatasi akar masalah.

I. PENDAHULUAN

Perairan Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan arena strategis yang dinamis, tempat bertemunya kepentingan ekonomi vital, penegasan kedaulatan negara, dan stabilitas keamanan regional. Fungsinya sebagai arteri ekonomi krusial sekaligus garda depan pertahanan menempatkannya pada posisi unik di Segitiga Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Tarakan adalah penggerak utama ekonomi Kalimantan Utara, melayani perdagangan domestik dan internasional, terutama dalam kerangka kerja sama sub-regional BIMP-EAGA

(Kementerian Dalam Negeri, 2022). Namun, konektivitas ekonomi ini menciptakan dualitas strategis: jalur perdagangan yang sama menjadi koridor bagi aktivitas ilegal seperti penyelundupan (Rustam, 2017). Hal ini menimbulkan rumusan masalah utama: bagaimana strategi pencegahan ancaman keamanan laut yang efektif dapat diimplementasikan di tengah kompleksitas peran geoekonomi dan geopolitik Tarakan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis strategi pertahanan yang ada, mengidentifikasi problematika implementasinya, dan merekomendasikan kerangka strategi yang komprehensif dan adaptif. Untuk

mencapai tujuan tersebut, organisasi penulisan artikel ini disusun secara sistematis, dimulai dari pendahuluan yang menguraikan konteks, dilanjutkan dengan metodologi penelitian, penyajian hasil dan pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

Landasan analisis dalam penelitian ini menggunakan Kerangka Teori Kompleks Keamanan Regional (*Regional Security Complex Theory* - RSCT) yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver. Teori ini menyatakan bahwa keamanan negara-negara dalam suatu kawasan geografis saling terkait erat, sehingga ancaman terhadap satu negara akan memengaruhi negara lainnya (Buzan & Wæver, 2003). Laut Sulu-Sulawesi, di mana perairan Tarakan menjadi bagian integralnya, merupakan contoh klasik dari sebuah kompleks keamanan regional. Ancaman seperti perompakan, penculikan, dan penyelundupan bersifat lintas batas dan tidak dapat ditangani secara unilateral, melainkan memerlukan respons kolektif (Joanita, Sitompul, & Retnaningsih, 2024; Buzan & Wæver, 2003). RSCT menjadi landasan untuk memahami mengapa strategi keamanan di Tarakan tidak bisa bersifat lokal semata, melainkan harus terintegrasi dalam sebuah konsep strategi keamanan regional yang melibatkan negara-negara tetangga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Fokus penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam strategi pencegahan ancaman keamanan laut di perairan Tarakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, yang bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan artikel berita yang relevan. Lokasi penelitian secara konseptual adalah perairan Tarakan dan kawasan Laut Sulu-Sulawesi yang lebih luas sebagai konteks regionalnya.

Tahapan penelitian ini meliputi: (1) Identifikasi Masalah, yaitu merumuskan tantangan keamanan di perairan Tarakan; (2) Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan dokumen dan literatur terkait dari berbagai sumber; (3) Analisis Data, yaitu menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan Kerangka Teori Kompleks Keamanan Regional (RSCT) untuk membedah dinamika ancaman dan respons institusional; dan (4) Penarikan Kesimpulan dan Formulasi Rekomendasi, yaitu

menyintesiskan temuan untuk menghasilkan kesimpulan dan saran strategis. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikannya secara naratif dan dalam bentuk tabel, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari analisis tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan Tarakan menghadapi spektrum ancaman yang luas, mulai dari kejahatan kekerasan lintas batas hingga pelanggaran kedaulatan. Untuk meresponsnya, telah terbentuk sebuah strategi keamanan berlapis yang melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional, regional, dan lokal. Spektrum Ancaman, ancaman utama yang teridentifikasi mencakup perompakan dan penculikan oleh kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf Group (ASG) (Rustam, 2017), penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing*) oleh kapal-kapal asing (Pashya & Gozali, 2023), penyelundupan barang, manusia, dan narkoba, serta ancaman pencemaran lingkungan seperti tumpahan minyak. Respon terhadap ancaman ini tidak monolitik, melainkan terdiri dari tiga lapis utama:

1. Aktor Nasional: Garda terdepan dipegang oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodamral) XIII TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan pertahanan dan penegak kedaulatan (Kodamral XIII, 2021), serta Bakamla RI Zona Maritim Tengah sebagai lembaga penjaga pantai (*coast guard*) yang berfokus pada penegakan hukum dan keselamatan laut (Pashya & Gozali, 2023).
2. Kerja Sama Regional: Pilar utama adalah Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yang mengoordinasikan patroli maritim dan udara (Yaoren et al., 2021). Tarakan menjadi lokasi salah satu dari tiga Pusat Komando Maritim (*Maritime Command Center* - MCC) bersama.
3. Partisipasi Komunitas: Lapisan pertahanan lunak diwujudkan melalui program Relawan Penjaga Laut Nusantara (Repala) yang dibina oleh Bakamla untuk memberdayakan nelayan sebagai "mata dan telinga" negara di laut.

Tabel berikut merangkum pembagian peran dan kewenangan dari setiap aktor utama:

Tabel 1. Peran dan Kewenangan Pengamanan

Aktor	Mandat Utama	Fokus Operasi
Kodaeral XIII (TNI AL)	Penegakan Kedaulatan & Pertahanan Militer	"Ancaman militer, pelanggaran wilayah kedaulatan, dukungan operasi tempur."
Bakamla Zona Tengah	Penegakan Hukum & Keselamatan (<i>Coast Guard</i>)	"Kejahatan lintas batas (penyelundupan, IUU fishing), SAR, keselamatan pelayaran."
Polairud	Penegakan Hukum Pidana di Laut	"Kriminalitas umum di perairan, menjaga ketertiban masyarakat pesisir."
Mitra TCA	Kerja Sama Keamanan Regional	"Perompakan, penculikan, terorisme maritim di wilayah perbatasan."
Repala (Masyarakat)	Pengawasan & Pelaporan Partisipatif	"Pelaporan aktivitas mencurigakan, deteksi dini ancaman."

B. Pembahasan

Analisis terhadap strategi keamanan di perairan Tarakan menunjukkan adanya upaya membangun model "tata kelola keamanan hibrida" yang mengintegrasikan aktor negara, antar-negara, dan non-negara. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka RSCT, yang mengakui bahwa ancaman di Laut Sulu-Sulawesi bersifat lintas batas dan memerlukan respons kolektif (Buzan & Wæver, 2003). Keberadaan TCA dan penempatan MCC di Tarakan adalah manifestasi dari pemahaman ini, di mana keamanan Tarakan tidak dapat dipisahkan dari stabilitas regional (Yaoren et al., 2021). Namun, implementasi strategi hibrida ini menghadapi tiga problematika fundamental.

Pertama, dilema tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral di tingkat nasional menjadi penghambat utama sinergi di lapangan (Suharni & Arman, 2023). Meskipun terdapat belasan lembaga dengan

mandat penegakan hukum di laut, koordinasi antar-instansi seperti TNI AL, Bakamla, dan Polairud seringkali tidak efektif (Anthoni Sugianto et al., 2021). Pluralitas institusi ini tidak secara otomatis menghasilkan keamanan yang efektif, melainkan berisiko menciptakan inkohereni strategis dan duplikasi upaya.

Kedua, kesenjangan kapasitas menjadi tantangan nyata. Jumlah aset patroli, baik kapal maupun pesawat udara, seringkali tidak sebanding dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi (Pratondo & Jupriyanto, 2022). Keterbatasan teknologi pengawasan canggih dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang membatasi efektivitas operasi (Pusat Penerangan TNI, 2025).

Ketiga, strategi yang ada cenderung berfokus pada penegakan hukum dan mengabaikan akar masalah sosio-ekonomi di komunitas pesisir. Kemiskinan, keterbatasan keterampilan, dan minimnya lapangan kerja legal membuat masyarakat rentan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penyelundupan atau IUU *fishing* sebagai pilihan untuk bertahan hidup (Rustam, 2017). Tanpa intervensi pada aspek kesejahteraan, strategi keamanan yang ada hanya akan mengatasi gejala, bukan penyebab utama kejahatan maritim.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Strategi pencegahan ancaman keamanan laut di perairan Tarakan telah berevolusi menjadi sebuah strategi hibrida yang berlapis, melibatkan sinergi antara aktor pertahanan nasional (Kodaeral XIII), penegak hukum (Bakamla), kerja sama regional (TCA), dan partisipasi masyarakat (Repala). Model ini merupakan respons adaptif terhadap kompleksitas ancaman lintas batas di Kompleks Keamanan Regional Laut Sulu-Sulawesi. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas strategi tersebut secara signifikan terhambat oleh tiga masalah sistemik: (1) friksi institusional akibat tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral; (2) kesenjangan kapasitas antara luas wilayah pengawasan dengan ketersediaan aset, teknologi, dan SDM; serta (3) pendekatan yang cenderung reaktif dan kurang menyentuh akar masalah sosio-ekonomi yang mendorong keterlibatan masyarakat pesisir

dalam aktivitas ilegal. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa tanpa adanya reformasi tata kelola yang mengedepankan sinergi terpadu dan pendekatan preventif berbasis kesejahteraan, strategi keamanan yang ada akan tetap berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini adalah analisis yang sepenuhnya didasarkan pada data sekunder, sehingga tidak menangkap dinamika dan persepsi aktor di lapangan secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran strategis. Pertama, perlu dibentuk Pusat Koordinasi Keamanan Laut Terpadu di Tarakan untuk menginstitutionalisasi perencanaan bersama, fusi intelijen, dan dekonflikasi operasi antar-lembaga penegak hukum di tingkat operasional. Kedua, pemerintah perlu mengakselerasi integrasi teknologi pengawasan (seperti drone dan AI) dengan intelijen berbasis komunitas melalui program Repala untuk menciptakan kesadaran domain maritim yang holistik. Ketiga, strategi keamanan harus diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi yang ditargetkan untuk masyarakat pesisir, seperti pelatihan keterampilan alternatif dan fasilitasi akses pasar, guna mengatasi akar masalah kemiskinan dan mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan maritim.

DAFTAR RUJUKAN

- Anthoni Sugianto, Dafri Agussalim, & Armaidly Armawi. (2021). Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya pada Aspek Pertahanan Keamanan. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(2), 113-126.
- Buzan, B. and Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Joanita, V., Sitompul, R. and Retnaningsih, A. (2024). Scenario Forecasting on the Sustainability of TCA Indomalphi in Suppressing Armed Robbery at Sea (2025–2045). *Jurnal Syntax Imperatif*, 5(6).
- Kementerian Dalam Negeri (2022). Peraturan Walikota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Tarakan: JDIH Kota Tarakan.
- Kodaeral XIII (2021). Peran Kodaeral XIII dalam Penegakan Kedaulatan NKRI di Perbatasan. Tersedia di: (<https://kodaeral13-koarmada2.tnial.mil.id/berita/19169/PERAN-KODAERAL-XIII-DALAM-PENEGAKAN-KEDAULATAN-NKRI-DI-PERBATASAN/>).
- Pashya, T.N. and Gozali, D. (2023). Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 9(1).
- Pratondo, A.S.S. and Jupriyanto (2022). Konsep Operasi Patroli Bakamla RI Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida di Wilayah Zona Maritim Natuna. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(3), pp. 237-247.
- Pusat Penerangan TNI (2025). Kepala Bakamla RI Jelaskan Strategi Wujudkan Tata Kelola Keamanan Laut. Tersedia di: <https://tni.mil.id/view-227937-kepala-bakamla-ri-jelaskan-strategi-wujudkan-tata-kelola-keamanan-laut.html>.
- Rustam, I. (2017). Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi-Laut Sulu. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), pp. 161-177.
- Suharni, M. and Arman, Y. (2023). Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), pp. 91–105.
- Yaoren, Y. et al. (2021). Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) INDOMALPHI: A Decade of Maritime Security Cooperation. [s.n.].